LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 11
Telp. dan Fax. (0536) 3224547
Palangka Raya 73112

2017

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

C. Aspek Strategis 4

D. Struktur Organisasi 5

E. Kondisi Kepegawaian 8

F. Isu – isu Strategis 10

G. Sistematika Penyajian 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD Tahun 2016 – 2021 13

B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 15

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 26

B. Analisis Capaian Kinerja 43

C. Akuntabilitas Keuangan 83

BAB IV PENUTUP 91

LAMPIRAN 95

1. Perjanjian kinerja tahun 2017 96
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 102
3. Rencana Kinerja Tahunan 2017 107
4. Rencana Kinerja Tahunan 2018 111

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I

1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian 8
1.2 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan 8
1.3 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan 8
1.4 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 9
1.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan 9
1.6 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia 10

BAB II

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 19
2.3 Penetapan Kinerja 22

BAB III

3.1 Realisasi Sasaran 26
3.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 27
3.3 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 1-2 31
3.4 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 3 32
3.5 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 4 33
3.6 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 5 34
3.7 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 6 34
3.8 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 7- 8 36
3.9 Dimensi Pengukuran IPG 37
3.10 Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru 37
3.11 Dimensi Pengukuran IDG 38
3.12 Capaian IDG dan IPG 2014 – 2015 38
3.13 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 9 39
3.14 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 10 -11 39
3.15 Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 – 2017 40
3.16 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 12 40
3.17 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 43
3.18 Indikator Kinerja Sasaran 1 44
3.19 lembaga yang menyusun dokumen ARG 45
3.20 Indikator Kinerja Sasaran 2 55

3.21 Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2017 pada P2TP2A 58
3.22 Indikator Kinerja Sasaran 3 61
3.23 Indikator Kinerja Sasaran 4 63
3.24 Data Kekerasan Terhadap Anak 2016- 2017 pada P2TP2A 65
3.25 Indikator Kinerja Sasaran 5 69
3.26 Indikator Kinerja Sasaran 6 70
3.27 Indikator Kinerja Sasaran 7 74
3.28 Indikator Kinerja Sasaran 8 76
3.29 Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2017 78
3.30 Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2016 79
3.31 Indikator Kinerja Sasaran 9 80
3.32 Kondisi BTl dan BL 2016 – 2017 83
3.33 Realisasi Belanja Langsung 2016 – 2017 84
3.34 BTL 2014 – 2017 90
3.35 BL 2014 – 2017 90
3.36 Relisasi Kegiatan dibawah 80% 90

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB I

1.1 Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah..... 7

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2017. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,Reformasi dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LKIP mengalami perubahan menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Pada LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2017 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2018.

Dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini disajikan :

1. Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

   Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan sebagai alat untuk :
   - Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
   - Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKIP;
   - Menilai keberhasilan organisasi.

2. Pengukuran kinerja, setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja

   Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

3. Laporan Akuntabilitas kinerja, yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

   Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtsar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

   Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang :
   a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
   b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
   c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
   d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan terget kinerja 5 tahun yang direncanakan (RPJMD)

   Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk :
   a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
   b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
   c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
   d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palangka Raya, 01 Maret 2018

KEPALA DINAS,

LIES FAHIMAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631207 199102 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan rencana kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2017. Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan mempunyai kedudukandan peran strategis dalam melaksanakan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, yaitu Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah. Untuk itu seluruh program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah didasarkan pada tujuan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan tahun 2016-2021 secara konsiten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tahun 2016-2021. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan adalah “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan adalah (1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, (2)Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak, (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta (4)Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 5 (lima) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran strategis, Kesembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah realisasinya pada tahun 2017 mencapai **71,04** Persen dengan pengukuran pada masing-masing tujuan strategis sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	Lembaga di Provinsi	41	34	82,93%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Lembaga di Provinsi	41	34	82,93%
		Kabupaten /Kota	11	9	81,81%
	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Kelompok Usaha	4	5	125%
	Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan	Kab/Kota	3	0	0%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	kualitas hidup				
	Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	5	1	20%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	5	1	20%
		Kabupaten /Kota	5	0	0%
Rata – rata capaian Indikator Kinerja					***29,44%***

Tujuan 2 : Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	Kebijakan di Provinsi	5	3	60%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	5	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	Organisasi	15	19	127%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	Lembaga di Provinsi	5	6	120%
		Kabupaten /Kota	14	14	100%
		Organisasi	1	0	0%

	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas	Persen	100	100	100%
Rata – rata capaian Indikator Kinerja					***72,43%***

Tujuan 3 : Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	2	200%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Kabupaten /Kota	2	2	100%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Kabupaten /Kota	2	2	100%
		Organisasi	15	0	0%
	Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	Desa	2	0	0%
Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Lembaga di Provinsi	8	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang	Lembaga di Provinsi	4	1	25%

	melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Organisasi	15	0	0%
	Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	100%
Rata – rata capaian Indikator Kinerja					***37,50%***

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100%
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100%
Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	Persen	100	100	100%
	Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja	Persen	100	100	100%
Rata – rata capaian Indikator Kinerja					***100%***

Tujuan 5 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	Orang	3	0	0%
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk	Kesepakatan`	1	1	100%
	Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	Dokumen	1	1	100%
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan	Dokumen	1	1	100%
	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	persen	80	79,21	99,01%
	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	orang	394.872	373.140	94,50%
Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	Kesepakatan`	1	1	100%
Rata – rata capaian Indikator Kinerja					***86,69%***

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	29,44 %
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	72,43%
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	44,44%
4	Meningkatnya perlindungan anak	28,57%
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%
6	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	100%
7	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	66,67%
8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	97,84%
9	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	100%
	Rata-rata persentase Capaian Sasaran	**71,04%**

Dalam hal anggaran, dukungan APBD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.990.711.216,- dengan alokasi sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK(%)
1.	Belanja Tidak Langsung	6.931.201.216	6.129.066.675	88,43	100
2.	Belanja Langsung	5.059.510.000	4.927.634.188	97,39	99,80
	Jumlah	11.990.771.216	11.056.700.863	92,21	99,92

Pencapaian kinerja input pada masing-masing Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.556.860.000**	**1.486.361.902**	**95,47**	**99,36**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	5.995.000	99,92	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.400.000	42.979.497	62,84	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000	55.120.156	91,87	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	591.328.000	581.896.000	98,4	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000	137.239.000	91,49	100
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	14.925.000	99,5	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	59.999.400	100	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	39.999.950	100	100
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100	100
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	16.380.000	81,9	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	34.990.000	99,97	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	310.000.000	305.834.499	98,66	100
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	181.132.000	181.003.400	99,93	100
15	Rujukan Berobat PNS	10.000.000	0	0	0
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**25.000.000**	**24.952.500**	**99,81**	**100**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	24.952.500	99,81	100
III	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan**	**80.000.000**	**79.987.500**	**99,98**	**100**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	keuangan				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja S KPD	15.000.000	15.000.000	100	100
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000	15.000.000	100	100
3	Penyusunan rka-SKPD	25.000.000	24.995.000	99,98	100
4	Penyusunan renja SKPD	25.000.000	24.992.500	99,97	100
IV	**Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**1.505.000.000**	**1.481.037.838**	**98,41**	**100**
1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	200.000.000	192.248.500	96,12	100
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab/Kota	140.000.000	139.401.760	99,57	100
3	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatap PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	50.000.000	48.514.405	97,03	100
4	Sosialisasi/Advokasi Pengembangan PHA di Kab/Kota seKalimantan Tengah	140.000.000	138.839.700	99,17	100
5	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	275.000.000	274.014.850	99,64	100
6	Rakornas Forum Anak Nasional	150.000.000	139.088.258	92,73	100
7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan S ayang Ibu	200.000.000	199.899.000	99,95	100
8	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	350.000.000	349.031.365	99,72	100
V	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**75.000.000**	**74.900.000**	**99,87**	**100**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	50.000.000	50.000.000	100	100
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	25.000.000	24.900.000	99,6	100
VI	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**1.000.000.000**	**977.822.334**	**97,78**	**100**
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	400.000.000	391.605.697	97,9	100
2	Sosialisasi Anti Kekerasan	50.000.000	49.997.500	100	100
3	Pengembangan S istem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	500.000.000	486.455.737	97,29	100
4	Penyediaan Jasa Operasional S atgas PkdRT (Penyuluhan, dll)	50.000.000	49.763.400	99,53	100
VII	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**300.000.000**	**292.404.414**	**97,47**	**100**
1	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	50.000.000	47.402.614	94,81	100
2	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	150.000.000	149.081.200	99,39	100
3	Promosi Peningkatan Peran S erta Perempuan Dalam Pembangunan	100.000.000	95.920.600	95,92	100
VII	**Program Penyusunan Profil Lembaga**	**295.000.000**	**288.751.550**	**97,88**	**100**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	220.000.000	214.637.050	97,56	100
2	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	75.000.000	74.114.500	98,82	100
VIII	**Program Keluarga Berencana**	**200.000.000**	**198.766.150**	**99,38**	**100**
1	Pelayanan KIE	125.000.000	124.631.150	99,7	100
2	Promosi Keikutsertaan Ber KB Pada Pasangan Usia S ubur (PUS)	75.000.000	74.135.000	98,85	100
IX	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah**	**22.650.000**	**22.650.000**	**100**	**100**
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	22.650.000	22.650.000	100	100
JUMLAH		**5.059.510.000**	**4.927.634.188**	**97,39**	**99,8**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dengan mempertimbangkan Program/Kegiatan prioritas.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan masing-masing.
3. Mengingat masih kurangnya data sektoral terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak, Kependudukan dan Keuarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupa data primer maupun data sekunder Perlu dilakukan inventarisasi dan survey data untuk mempermudah pengukuran kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kiman Tengah Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinatah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.

5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan

kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;

7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi *"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)".* Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam "Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Kepala Sub Bagian Program;
   b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
   a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
      1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG
      2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
      3) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
   b. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
      1) Kepala Seksi Data
      2) Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi

3) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat

c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
   1) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
   2) Kepala Seksi Perlindungan Anak
   3) Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
   1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
   2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
   3) Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
   1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
   2) Kepala Seksi Keuarga Sejahtera
   3) Kepala Seksi Keluarga Berencana

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar 1.1 :

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

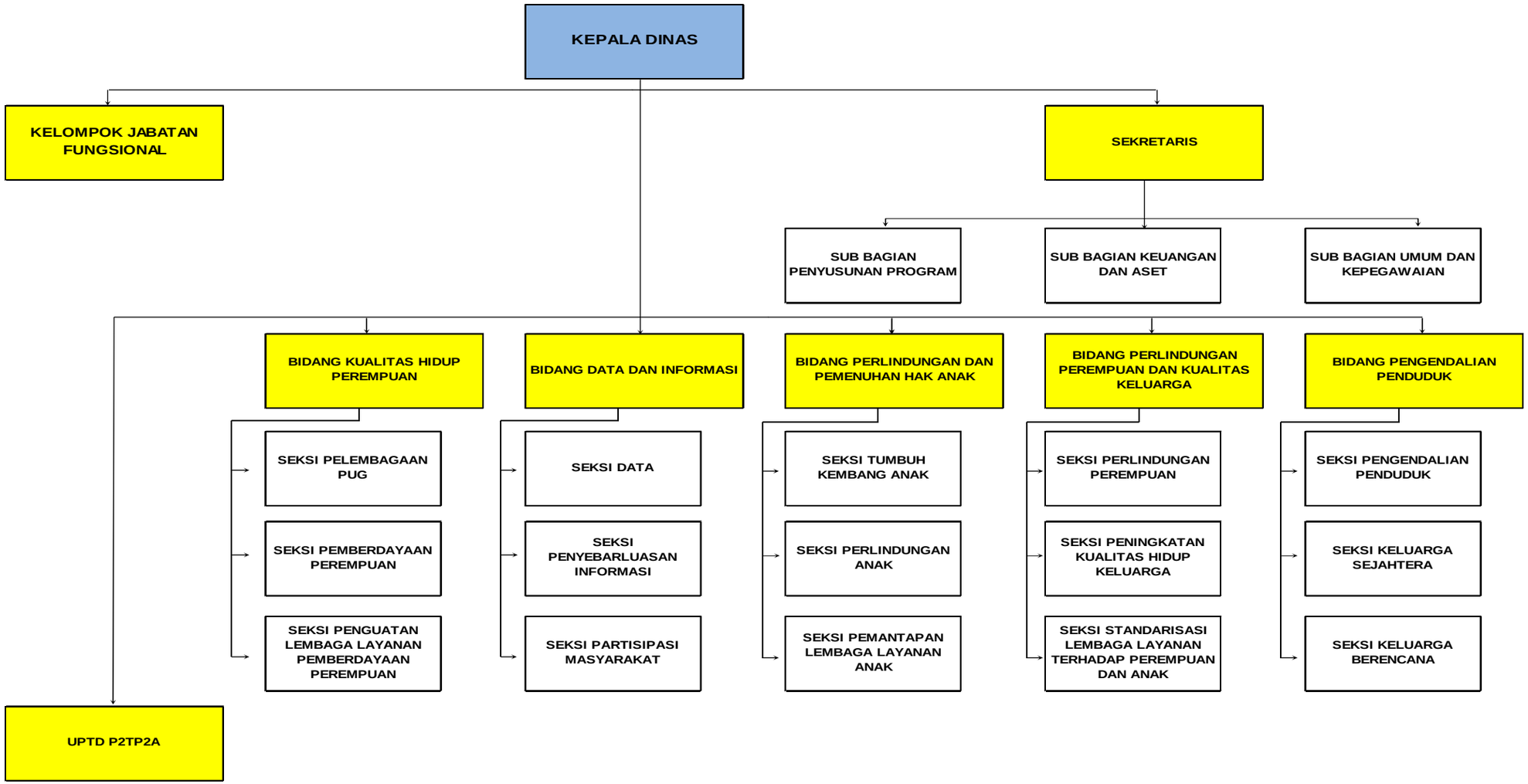

E. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyeleggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2017 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	18	40	58
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	8	10	18
Jumlah		**26**	**50**	**76**

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	8	12
2.	Golongan III	10	28	38
3.	Golongan II	2	4	6
4.	Golongan I	2	-	2
Jumlah		**18**	**40**	**58**

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	-	-	-
2.	SLTP	2	-	2
3.	SLTA	4	12	16
4.	D3	1	3	4
5.	S1	7	21	28
6.	S2	4	3	7
7.	S3	-	1	1
Jumlah		**18**	**39**	**58**

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir, namun yang perlu diingat bahwa dalam prinsip manajemen organisasi yang baik adalah tingkatan *low mangement* komposisinya harus lebih banyak

daripada tingkat *middle mangement* . Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	1	5	6
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	16	8	8	16
4.	Fungsional Tertentu / Arsiparis	Esselon V	1	-	1	1
Jumlah			**24**	**9**	**15**	**24**

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	1	1	12
2.	Pembina Tk. I	IV / b	1	7	8	
3.	Pembina	IV / a	3	-	3	
4.	Penata Tk. I	III / d	6	12	18	38
5.	Penata	III / c	-	-	-	
6.	Penata Muda Tk. I	III / b	3	10	13	
7.	Penata Muda	III / a	2	5	7	
8.	Pengatur Tk. I	II / d	-	3	3	6
9.	Pengatur	II / c	2	-	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	-	0	
11.	Pengatur muda	II / a	-	1	1	
12.	Juru	I / c	2	-	2	2
Jumlah			**19**	**39**	**58**	**58**

Komposisi jumlah PNS tahun 2017 sebanyak 58 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, ternyata terjadi penggelembungan piramida di tingkat *middle management* atau level PNS pada Golongan III sebanyak 38 orang atau sebesar 65,52 %, sedangkan pada level *low management* atau PNS pada Golongan II dan golongan I sebanyak 8 orang atau sebesar 13,80 %, artinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan masih belum bisa dikatakan ideal. Dari kondisi tersebut di atas, kondisi idealnya dari PNS yang ada pada tingkat *top management* atau Gol. IV sebesar 25 % atau sebanyak 15 orang, untuk Golongan III pada tingkat *middle management* sebesar 30 % atau sebanyak 17 orang, sedangkan pada tingkat *low management* atau PNS Golongan II dan I sebesar 45 % atau sebanyak 26 orang.

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2017				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	**< 30 Tahun**	0	0	3	100	3	5,17	Produktif (31,03 %)
2.	**30 – 39 Tahun**	7	46,67	8	53,33	15	25,86	
3.	**40 – 49 Tahun**	4	40	6	60	10	17,24	Umum (17,24 %)
4.	**≥ 50 tahun**	8	26,67	22	73,33	30	51,72	Kurang Produktif (51,72 %)
Jumlah		**19**	**32,76**	**39**	**67,24**	**58**	**100**	

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) tergolong minim atau sebesar 31,03 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (≥ 50 tahun) sebesar 51,72 % dan sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 4 orang atau 6,89 %.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 50 % atau sebanyak 29 orang. Kondisi riil jumlah PNS dalam usia produktif sebanyak 18 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 30 % atau sebanyak 17 orang. Kondisi riil jumlah PNS pada kisaran umur tersebut sebanyak 10 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 20 % atau sebanyak 12 orang. Kondisi riil jumlah PNS di atas 50 tahun sebanyak 30 orang.

F. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah a Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
   a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
   b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
   c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

2. Perlindungan Anak :
   a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
   b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
   c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalah kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Aspek Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2017 meliputi RPJMD 2016 – 2021, RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 dan penetapan kinerja tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendaian Penduduk da Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD tahun 2016 – 2021
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

A. RPJMD Tahun 2016 – 2021

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
e. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
f. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021;

g. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah;

i. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 4 aspek yang menjadi gambaran umum kondisi daerah. Antara lain :

1. Aspek Geografis dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan ke 4 (empat) aspek tersebut perencanaan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam Aspek Pelayanan Umum pada “fokus pelayanan urusan wajib(non pelayanan dasar) “ bagian pemberdayaan perempuan dimana dijelaskan Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin. Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengmbilan keputusan. IDG

menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

B. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

"Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah".

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :

1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan. Dengan berdasarkan

pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan 2 Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

Tujuan 3 Meningkatnya Pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan 5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai tahunan selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga
			Tersedianya lembaga layanan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup
			Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak
			Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak
2	Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak
			Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan secara tuntas
3	Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak
			Tersedianya kebijakan yang memfasilitasi aspirasi anak
			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak
			Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat
		Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak dalam kondisi khusus
			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak
			Persentase pengaduan kasus anak dalam kondisi khusus

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			yang di tindaklanjuti
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
		Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif
			Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk
			Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk
			Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Berencana melalui KIE	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan
		Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera
			Jumlah SDM yang diberikan Bimbingan Teknis tentang Ketahanan Keluarga
			Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimanatan Tengah serta RPJMD 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama ditetepkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal *business process* (peningkatan kapasitas jaringan internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dIgunakan untuk periode waktu tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga
		Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup
		Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak
		Jumlah lembaga yang

		mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak
		Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak
	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan
		Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas
	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak
		Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat
	Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus
		Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti
	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen

	pengelolaan penunjang pelaksana tugas	kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif
		Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk
		Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan
		Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)
		Meningkatnya jumlah peserta KB aktif
	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera
		Jumlah SDM yang diberikan Bimbingan Teknis tentang Ketahanan Keluarga
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan surat Edaran Meneteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/321/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai knerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Penetapan kinerja SKPD yang telah sepakati pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	1 Kebijakan di Provinsi
			1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2 Kabupaten /Kota
			15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	41 Lembaga di Provinsi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	41 Lembaga di Provinsi
			11 Kabupaten /Kota
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi	4 Kelompok Usaha

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		keluarga	
		Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup	3 Kab/Kota
		Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak	1 Kebijakan di Provinsi
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak	5 Lembaga di Provinsi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	5 Lembaga di Provinsi
			5 Kabupaten /Kota
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	5 Kebijakan di Provinsi
			5 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	5 Lembaga di Provinsi
			14 Kabupaten /Kota
			1 Organisasi
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas	100 Persen
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	1 Kebijakan di Provinsi
			1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak	4 Lembaga di Provinsi
			2 Kabupaten /Kota
			15 Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	4 Lembaga di Provinsi
			2 Kabupaten /Kota
			15 Organisasi
		Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	2 Desa
4	Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	1 Kebijakan di Provinsi
			1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	8 Lembaga di Provinsi
			15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	4 Lembaga di Provinsi
			15 Organisasi
		Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	100 Persen
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	100 Persen
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	100 Persen
6	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	100 Persen
		Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja	100 Persen
7	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	3 Orang
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk	1 Kesepakatan`
		Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	1 Dokumen
8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam	1 Dokumen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Keluarga Berencana	mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan	
		Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	80 persen
		Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	394.872 orang
9	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	1 Dokumen
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	1 Kesepakatan`

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan akan disimpulkan apakah berhasil atau gagal masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Data dan informasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Sasaran

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	29,44 %
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	77,14%
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	22,22%
4	Meningkatnya perlindungan anak	14,29%
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%
6	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	100%
7	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	66,67%
8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	97,84%
9	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	100%
	Rata-rata persentase Capaian Sasaran	***67,51%***

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 berdasarkan pengukuran pada indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	Lembaga di Provinsi	41	34	82,93%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Lembaga di Provinsi	41	34	82,93%
		Kabupaten /Kota	11	9	81,81%
	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Kelompok Usaha	4	5	125%
	Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup	Kab/Kota	3	0	0%
	Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Organisasi	15	0	0%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	5	1	20%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	5	1	20%
		Kabupaten /Kota	5	0	0%
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	Kebijakan di Provinsi	5	7	140%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	5	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	Organisasi	15	15	100%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	Lembaga di Provinsi	5	5	100%
		Kabupaten /Kota	14	14	100%
		Organisasi	1	0	0%
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas	Persen	100	100	100%
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	2	200%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Kabupaten /Kota	2	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	Desa	2	0	0%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Kebijakan di Provinsi	1	0	0%
		Kebijakan di Kabupaten / Kota	1	0	0%
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Lembaga di Provinsi	8	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Lembaga di Provinsi	4	0	0%
		Organisasi	15	0	0%
	Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	100%
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100%
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100%
Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	Persen	100	100	100%
	Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja	Persen	100	100	100%
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	Orang	3	0	0%
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan	Kesepakatan`	1	1	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pengendalian Penduduk				
	Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	Dokumen	1	1	100%
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan	Dokumen	1	1	100%
	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	persen	80	79,21	99,01%
	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	orang	394.872	373.140	94,50%
Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	Kesepakatan`	1	1	100%

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam "Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. dimana hal tersebut tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, dengan bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Terdapat beberapa indikator pelayanan yang harus dijawab guna mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 1-2

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	9,94	7,60	10,41	6,50	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2017
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	19,57	87,39	21,58	88,76	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2017

Komponen penghitungan dari Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta adalah sebagai berikut :

a. Pekerja Perempuan dilembaga Pemerintah adalah jumlah PNS perempuan di Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2017 berjumlah 30.339 orang, pada tahun 2016 berjumlah 34.506 orang;

b. Pekerja perempuan di Lembaga Swasta adalah pekerja perempuan yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar , berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar , Pekerja bebas, Pekerja keluarga/tak dibayar. Atau didapat dari jumlah perempuan bekerja (angkatan kerja) dikurangi dengan jumlah perempuan bekerja di lembaga pemerintah, pada tahun 2017 berjumlah 414.003 orang, pada tahun 2016 berjumlah 396.568 orang;

c. Tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang masuk kedalam angkatan kerja Perempuan dan berusia 15 tahun ke atas, pada tahun 2017 berjumlah 466.553 orang, pada tahun 2016 berjumlah 453.807 orang;

d. Rumus yang digunakan pekerja perempuan dilembaga pemerintah/swasta dibagi jumlah Tenaga kerja perempuan di kali 100.

Perhitungan secara kumulatif berdasarkan rumus tentang jumlah perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2017 sebesar : (30.339/466.553)*100 = 6,50 %., apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang tercapai sebesar : (34.506/453.807)*100 = 7,60% maka terjadi penurunan sekitar 1,1%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami penurunan yaitu: " jumlah perempuan di lembaga pemerintah" walaupun jumlah tenaga kerja perempuan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 12.746 orang.

Untuk jumlah perempuan dilembaga swasta pada tahun 2017 sebesar :

(414.003/466.553)*100 = 88,74 %, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang tercapai sebesar : (396.568/453.807)*100 = 87,39% maka terjadi kenaikan sekitar 1,35%. Hal ini dipengaruhi oleh komponen yang mengalami kenaikan yaitu : "jumlah perempuan dilembaga swasta" yang diiringi dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan pada tahun 2017.

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 3

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Rasio KDRT	0,0275	0,0834	0,0244	0,0181	Sumber data : BPS, kalteng dalam angka 2017 P2TP2A Provinsi Kalteng

Indikator penurunan Rasio KDRT merupakan rincian dari Jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1000

a. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2017 tercatat sebanyak 12 kasus berdasarkan angka yang tercatat pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah, untuk data resmi tahun 2017 masih dalam proes pengumpulan data oleh BPS; jika dibandingkan dengan tahun 2016 tercatat ada 54 kasus berdasarkan data resmi BPS dalam publikasi kalteng dalam angka 2017.
b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2017 berjumlah 661.243 dan pada tahun 2016 berjumlah 646.780 berdasarkan angka dari BPS dalam publikasi Kalimantan Tengah dalam angka 2017
c. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2017 = (12/661.243)*1000 = 0,0181, jika dibandingkan dengan dengan tahun 2016 =(54/646.780)=0,0834
d. Capaian pada tahun 2017 sebesar 0,0181, artinya dapat menurunkan sampai pada 0,0181 dari target 0,0244 yaitu sekitar 0,0063;
e. Capaian pada tahun 2017 adalah 0,0181 artinya bahwa pada tahun 2017 setiap 1000 rumah tangga terdapat 0,0181 kasus KDRT;
f. Apabila dibandingkan dengan Realisasi tahun 2016 sebesar 0,48 maka terdapat penurunan sekitar 0,22%, atau sekitar 0,0654.

Dengan memperhatikan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2017 dan 2016 terdapat penurunan sebanyak 42 kasus dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga berhasil , disisi lain hal ini masih belum dapat dikatakan keberhasilan apabila terjadinya penurunan

kasus disebabkan berkurangnya laporan/pengaduan dari masyarakat pada unit layanan, dengan kata lain bahwa kepedulian masyarakat masih belum meningkat. Hal ini tentunya masih harus di analisa lebih lanjut lagi.

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 4

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,38	10,96	0,30	7,56	Sumber data : BPS profil anak bekerja 2016

Indikator persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur merupakan rincian dari Jumlah anak usia dibawah 12 tahun yang bekerja dibagi jumlah anak angkatan kerja yang bekerja pada rentang usia 10-17 tahun dikali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah anak usia dibawah 12 tahun yang bekerja pada tahun 2017 adalah 2.486 orang , pada tahun 2016 sebesar 3.521
b. jumlah anak yang bekerja pada tahun 2017 adalah 32.904, pada tahun 2016 sebesar 32.114
c. persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pad tahun 2017 = (2.486/32.904)*100=7,56%
d. pada tahun 2016 persentase jumlah tenaga kerja anak dibabawah umur = (3.521/32.114)*100=10,96%

Capaian pada tahun 2017 adalah 7,56% atau mengalami penurunan sebesar 3,4% jika dibandingkan dengan capaian pada 2016 sebesar 10,96%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami penurunan yaitu: "jumlah anak usia 12 tahun kebawah yang bekerja" walaupun jumlah anak yang bekerja pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 790.

Pada tahun 2017 angka anak bekerja masih relatif tinggi, keberhasilan dalam menekan angka tenaga kerja anak dibawah umur masih belum optimal atau dapat dikatakan bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak masih tinggi. kondisi ideal yang diharapan adalah tidak ada lagi anak dibawah umur yang bekerja.

keberhasilan pemerintah dalam menekan jumlah pekerja anak atau menghentikan eksploitasi terhadap anak sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi keluarga. Selama mereka terkungkung dalam cara pandang yang keliru, bahwa anak merupakan faktor produksi tenaga kerja, eksploitasi terhadap anak

bakal terus berlanjut. Di atas itu semua, eksploitasi terhadap anak pada dasarnya tidak terlepas dari alasan ekonomi keluarga. Tak bisa dimungkuri, kondisi serba kekurangan dan tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga seringkali merupakan penyebab utama sehingga anak dipaksa bekerja. Karena itu, upaya paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan eksploitasi terhadap anak sejatinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 5

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,03	53,55	53,06	53,61	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka

Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan rincian dari Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas dikali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 berjumlah 466.553, pada tahun 2016 berjumlah 453.807.
b. Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas pada tahun 2017 berjumlah 870.337, pada tahun 2016 berjumlah 847.479
c. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 = (466.553/870.337)*100=53,61%
d. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2016 = (453.807/847.479)*100=53,55%

Capaian pada tahun 2017 adalah 53,61% atau mengalami kenaikan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan capaian pada 2016 sebesar 53,55%. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen penghitungan yang mengalami kenaikan yaitu: " Jumlah perempuan tergolong angkatan kerja perempuan" dan "Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas " yang menandakan meningktnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia kerja.Walaupun capaian ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 87,20%.

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 6

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	Sumber data : P2TP2A Provinsi Kalteng

Indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan rincian dari Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan ditambah jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani tuntas di kali 100, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 berjumlah 23, pada tahun 2016 berjumlah 21.
b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 berjumlah 45, pada tahun 2016 berjumlah 26
c. Jumlah pengaduan yang ditangani tuntas oleh P2TP2A pada tahun 2017 berjumlah 68, pada tahun 2016 berjumlah 47
c. Penyelesaiain pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tinda kekerasan tahun 2017 = ((23+45)/68*100=100%
d. Penyelesaiain pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tinda kekerasan tahun 2016 = ((21+26)/47*100=100%
e. Capaian pada tahun 2017 adalah 100% yang menunjukan bahwa dari seluruh pengaduan kasus yang terjadi dapat diselesaikan seluruhnya sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku di P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.8

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 7- 8

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,20	*77,87*	78,25	*77,87*	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka Formula : 1/3[Xede(1)+Xede(2)+Linc-Dist] Xede(1)=Xede untuk harapan hidup Xede(2)=Xede untuk pendidikan Linch-Dist=Indeks Distribusi pendapatan
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,34	*89,25*	89,36	*89,25*	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2017 Formula : IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan
Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Dimensi Pengukuran IPG

Dimensi	Indikator	
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	**IPG/GDI**
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Tabel 3.10

Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jenis kelamin	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	• IPG harus dianalisis bersama IPM • Selisih IPG dg IPM merupakan gap capaian gender • Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki • Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki	• IPG dapat diinterpretasikan sendiri • Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki • IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki • IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki • IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

- IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.
- IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
- Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Tabel 3.11

Dimensi Pengukuran IDG

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2016 dan 2017 masih menggunakan angka capaian terakhir pada tahun 2015. Sedangkan capaian pada tahun 2016 dan 2017 masih dalam tahap pengumpulan data. Data yang dapat disajikan 2 (dua) tahun terakhir 2014 – 2015 berdasarkan capaian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian IDG dan IPG 2014 - 2015

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2014	2015	2014	2015
Kalimantan Tengah	**89.33**	**89.25**	**77.90**	**77.87**
Kotawaringin Barat	90.04	90.04	64.48	63.98
Kotawaringin Timur	86.07	86.79	69.91	70.23
Kapuas	95.36	95.65	62.46	68.21
Barito selatan	93.46	93.34	84.02	83.88
Barito utara	85.50	85.62	83.51	84.35
Sukamara	90.14	90.09	60.27	61.24
Lamandau	91.06	91.55	54.65	53.55
Seruyan	88.87	88.42	69.47	69.70
Katingan	83.88	84.78	62.33	60.79
Pulang Pisau	90.27	90.25	69.38	69.32
Gunung Mas	91.80	92	81.01	79.98
Barito Timur	87.75	88.16	66.01	75.80
Murung Raya	81.53	82.31	65.16	65.82
Kota Palangka Raya	93.80	94.30	79.59	79.83

Tabel 3.13

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 9

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,00	0,58	1,10	0,58	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka, profil anak bekerja

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan rincian dari Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun di bagi dengan jumlah rumah tangga/keluarga, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk anak pada tahun 2017 berjumlah 383.058, pada tahun 2016 berjumlah 377.413
b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2017 berjumlah 661.243, pada tahun 2016 berjumlah 661.243
c. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2017 = 383.058/661.243=0,58
d. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2016 = 377.413/646.780=0,58
e. Capaian pada tahun 2017 adalah 0,58 yang menunjukan secara umum kondisi di Provinsi kalimantan tengah bahwa dalam setiap rumah tangga rata-rata memiliki 0-1 orang anak, hal ini menunjukan keberhasilan program keluarga berencana dalam menurunkan rata-rata jumlah anak perkeluarga.

Tabel 3.14

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 10 -11

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Rasio akseptor KB	0,788	0,781	0,797	0,792	Sumber data : BKKBN Formula : Jumlah peserta KB aktif dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama
11	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	378.790	368.652	382.023	373.140	Sumber data : BKKBN Formula : Jumlah peserta KB aktif dalam 1 tahun

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu)

tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. pada tahun 2017 Jumlah peserta KB aktif 373.140 dan Jumlah Pasangan Usia Subur 471.099 jadi rasio akseptor KB = 373.140/471.099= 0,792, hal ini menunjukan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB masih kurang, namun sudah menunjukan hasil yang positif karena terjadi peningkatan jumlah akseptor maupun jumlah rasio jika melihat kondisi pada Pada tahun 2016 rasio akspetor KB = 0,781, walaupun pada tahun pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah pasangan usia subur.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Data PUS dan Peserta KB Aktif 2016 - 2017

Provinsi / Kabupaten / Kota	Pasangan Usia Subur (PUS)		Peserta KB Aktif	
	2016	2017	2016	2017
Kalimantan Tengah	**471776**	**471099**	**368652**	**373140**
Kotawaringin Barat	45852	44388	32639	31976
Kotawaringin Timur	78998	86171	61720	66400
Kapuas	83413	82698	64456	67053
Barito selatan	27286	17288	20854	12968
Barito utara	24437	23980	19387	18971
Sukamara	7858	11287	6427	9615
Lamandau	14135	14298	11139	11949
Seruyan	25332	18833	18128	14438
Katingan	36212	36682	28338	28784
Pulang Pisau	22288	21054	18373	16604
Gunung Mas	28927	23563	23212	17595
Barito Timur	14231	24210	11461	18981
Murung Raya	19440	20547	15440	17752
Kota Palangka Raya	43367	46100	37078	40054

Tabel 3.16

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD 12

NO	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	176.103	55.110	170.497	243.211	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka Formula : Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 dalam 1 tahun

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

   Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.
2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

   Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :
   - Anggota keluarga melaksanakan ibadah
   - Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
   - Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
   - Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
   - Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.
3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

   Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :
   - Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
   - Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
   - Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
   - Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
   - Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing

- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

   Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

   - Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
   - Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
   - Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
   - Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
   - Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
   - Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
   - Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

   Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

   - Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
   - Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

Pada tahun 2017 jumlah Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera di Provinsi kalimantan tengah berjumlah 243.211, jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi pada tahun 2016 yang berjumlah 55.110. hal ini menunjukan terjadinya peningkatan jumlah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya maupun yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keuarga sejahtera I per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera 1	
	2016	2017
Kalimantan Tengah	**55.110**	**243.211**
Kotawaringin Barat	2.325	22.678
Kotawaringin Timur	6.840	37.527
Kapuas	16.715	41.520
Barito selatan	2.392	18.299
Barito utara	2.516	15.479
Sukamara	5.084	4.444
Lamandau	1.367	8.205
Seruyan	366	8.432
Katingan	863	16.366
Pulang Pisau	3.719	15.284
Gunung Mas	2.897	9.588
Barito Timur	1.668	13.402
Murung Raya	2.427	7.607
Kota Palangka Raya	5.931	24.380

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :.

Sasaran 1	*Tingkat Capaian*
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	29,44 %

Tabel 3.18

Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan di Provinsi	1	1	100	1	0	0
	Kebijakan di Kabupaten / Kota	0	0	0	1	0	0
Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kabupaten /Kota	0	0	0	2	0	0
	Organisasi	0	0	0	15	0	0
Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	Lembaga di Provinsi	46	46	100	41	34	82,93
Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Lembaga di Provinsi	46	46	100	41	34	82,93
	Kabupaten /Kota	14	9	64,28	11	9	81,81%
Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	Kelompok Usaha	0	0	0	4	5	125
Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup	Kab/Kota	0	0	0	3	0	0
Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak	Kebijakan di Provinsi	1	4	400	1	0	0

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Organisasi	0	0	0	15	0	0
Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	0	0	0	5	1	20
Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	Lembaga di Provinsi	0	0	0	5	1	20
	Kabupaten /Kota	0	0	0	5	0	0

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan terdiri dari 10 indikator yaitu :

Indikator : Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG

Pada tahun 2017 ditargetkan 41 lembaga di lingkup Pemprov. Kalteng telah menyusun dokumen anggaran responsif gender(ARG), Realisasinya adalah 34 lembaga yang telah menyusun dokumen ARG, tingkat realisasi indikator = (34/41)*100 = 82,93%.

Daftar perangkat daerah beserta program dan kegiatan yang ARG sebagai berikut :

Tabel 3.19

lembaga yang menyusun dokumen ARG

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan Pengendalian Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Penguatan Koordinasi Kesehatan Ibu dan Anak
			Kegiatan Penguatan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Kegiatan Penguatan Tim Koordinasi Sistem Layanan Rujuk Terpadu (SLRT)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyuluhan Penegakan Perda/Pergub

3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pengawasan Ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Pekerjaan Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
4	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Peternakan	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan Kawasan Sentra Agibisnis Hortikultura
			-Pengembangan Bawang Merah 35 Ha Dan Cabe 35 Ha
6	Dinas Kehutanan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
7	Dinas Sosial	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Sosial Program Pm2l Dan Pmks
8	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
			Mengikuti Bimbingan Teknis Dan Pelatihan
			Pelatihan Pemetaan Tematik Wilayah Serangan Opt Perkebunan
			Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman(Opt) Perkebunan
			Diklat Non Teknis
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pengembangan Pelayanan Kepegawaian
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur (Geber-Mlt)
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan Dengan Pengembangan Diversifikasi Tanaman
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertemuan Teknis Petugas Pphp Provinsi Kalimantan Tengah
			Pengembangan Bokar Bersih dan Komoditi Unggulan Lain
			Lomba Kelompok Tani
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
			Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
			Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (Pltb)
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Bibit Unggul Pertaniaan / Perkebunan

			Pertemuan Kerjasama Mantri Tani Dan Mantri Statistik
			Sosialisasi Percontohan Kebun Bersih
			Koordinasi,Sinkronisasi dan Validasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota Se-Kalteng
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Melalui Puisat Komunitas Kreatif
10	Biro Hukum Setda Prov Kalteng	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Produk Hukum Daerah
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham	Pemasyarakatan dan Pendidikan Ham
11	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantaun Kualitas Air
			Pemantauan Kualitas Udara
			Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan
			Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pengelolaan Aparator Pengelolaan Persampahan
			Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
			Pembinaan Pengelolaan Persampahan
		Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
			Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Ke Sumber Sumber Air
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sda	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehab Dan Pemulihan Cadangan SDA
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lh	Penyelenggaraan Pameran Lh di Daerah
			Pembinaan Generasi Peduli Lingkungan Pemberian Anugerah Lingkungan Hidup Kalpataru
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov Kalteng	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran

13	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Monitoring dan Evaluasi Program	Rapat Kerja Pertambangan
		Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	Sosialisasi Stop Peti
15	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Ekonomi Perempuan Melalui Wadah Koperasi
16	Rsud Dr. Doris Sylvanus	Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit
			Peningkatan Mutu Pelayanan
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Desa Tertinggal
18	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Operasi Katarak
			Pelayanan Kesehatan Lapangan
			Pengobatan Massal
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Lomba Balita Dan Kampanye Pekan Asi
			Orientasi Petugas Dalam Menanggulangi Anemia Pada Ibu Hamil Dan Remaja Putri
			Talkshow Pekan Asi Dalam Rangka Meningkatkan Cakupan Asi Eksklusif dan Cakupan Inisiasi Menyusui Dini (Imd)
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Mobil Vct
			Penguatan Kpad
			Penguatan Yayasan Kanker Indonesia Cab. Palangka Raya
		Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Monitoring Evaluasi Penjaringan Anak Usia Sekolah
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	Monitoring Evaluasi Terpadu Angka Kematian Ibu, Neonatal, Bayi, dan Anak Balita
			Pemeriksaan Faktor Resiko Ca Serviks dan Payudara Pada Perempuan Usia 30-50 Thn
		Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (Ptm)	Bimtek Ke Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa Dan Atau Napza
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalteng	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan Desa
20	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Kalten	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
21	Biro Organisasi Setda	Penataan Kelembagaan dan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

	Prov. Kalteng	Ketatalaksanaan	Prov. Kalteng
	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Dan Gizi Keluarga	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga
			Sosialisasi Diversifikasi Pangan Bagi Ibu-Ibu Kelompok Tani, Pkk
		Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Lomba Cipta Menu 3b Tingkat Propinsi/Nasional
22	Sekretariat Dprd	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Responsif Gender
23	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan Capra Ipdn
24	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Peningkatan Sdm Pengelola Perpustakaan	Diklat Teknis, Sosialisasi dan Penyuluhan Perpustakaan
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Sosialisasi Dan Advokasi PUG
			Monitoring Dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
			Sosialisasi Penyuluhan Tentang Pergaulan Bebas Bagi Pelajar (SLTP/SLTA Sederajat)
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan +	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (Gsi) Kabupaten Dan Kota Se Propinsi Kalteng
			Monitoring Dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu(Gsi)
26	Rsj Kalawa Atei	Peningkatan Mutu Rumah Sakit (Arg)	Akreditasi RS
			Peningkatan Mutu Pelayanan
27	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan (3.01.25)	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil (3.01.25.09)
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
28	Dinas Pendidikan	Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Ii	Apresiasi Bunda Paud dan Gugus Paud
29	Badan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Normal
			Asistensi Penyusunan Anjab,ABK,dan SKP
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Skpd
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Apbd Se Kalimantan Tengah
30	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan Bencana	Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana di Kab/Kota

		Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat	Pembentukan Lembaga Forum Pengurangan Resiko Bencana (Fprb) Propinsi Kalimantan Tengah
31	Inspektorat	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah	Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu
32	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Propinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Pembinaan Pemuda/ Remaja Antar Agama
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kompetensi ASN Peserta Diklat Pim III Lingkup Provinsi Kalteng dan Kab/Kota
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Kapasitas SDM	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan dan Keahlian

Indikator : Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga

Pada tahun 2017 ditargetkan 4 kelompok usaha perempuan yang mendapatkan pembinaan dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga, Realisasinya adalah 5 kelompok usaha, tingkat realisasi indikator = (5/4)*100 = 125%.

Indikator : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Pada tahun 2017 belum ada kebijakan yang baru terkait pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.

Indikator : Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Pada tahun 2017 tidak dilaksanakan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan aplikasinya, mengingat sosialisasi terkait PUG dan pemberdayaan perempuan sudah dilaksanakan kepada lembaga-lembaga di lingkup Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota.

Indikator : Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Pada tahun 2017, jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan perempuan berjumlah 34 lembaga dari target sebanyak 41 lembaga, tingkat realisasi indikator =(34/41)*100=82,39%. Dan sampai akhir tahun 2017 masih 9 Kabupaten/ kota dari target sebanyak 11 Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan tingkat realisasi =(9/11)*100=81,81%. Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender adalah :

1. Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten Gunung Mas
3. Kabupaten Kapuas
4. Kabupaten Barito Utara
5. Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kabupaten Barito Selatan
7. Kota Palangka Raya
8. Kabupaten Kotawaringin Timur
9. Kabupaten Pulang Pisau

Indikator : Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup

Pada tahun 2017 belum tersedia lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator : Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak

Pada tahun 2017 tidak terdapat kebijakan baru yang mangatur tentang penyusunan data terpilah gender dan anak, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya baik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota masih terdapat kebijakan yang masih berlaku . Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

1. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188/54/13/2011 tentang Pengumpulan Data dan Informasi Terpilah Pengarustamaan Gender dan Anak.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188/44/140/2014 tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.5/0353/III/2015 tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi / Kabupaten /Kota se-Kalimantan tengah
4. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 401/55/BPPKB.5/VIII/2016 tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator : Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak

Pada tahun 2017 tidak dilaksanakan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan anak, mengingat sosialisasi terkait data terpilah gender dan

anak sudah dilaksanakan kepada lembaga-lembaga di lingkup Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di tahun sebelumnya.

Indikator : Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak

Pada tahun 2017 ditargetkan 5 lembaga di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah mampu menyusun data terpilah gender dan anak disesuaikan dengan sektor layanan, realisasinya 1 lembaga/perangkat daerah, dengan tingkat realisasi = (1/5)*100=20%. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, melalui penyusunan Dokumen data terpilah gender dan anak kalimantan tengah tahun 2017.

Indikator : Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak

Pada tahun 2017 ditargetkan 5 lembaga di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan anak, realisasinya 1 lembaga/perangkat daerah, dengan tingkat realisasi = (1/5)*100=20%. Pelaksanaan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan menyusun dokumen kelembagaan.

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
    1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
    3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif

gender.

c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengenalian Pendudul dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan antara lain :

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

a. Belum adanya regulasi yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota
b. Masih rendahnya komitmen para penentu kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota
c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentidfikasi isu gender yang ada
d. Keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor pembangunan
e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta

koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.

b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan

c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;

e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana masih bervariasi;

f. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran;

g. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.

h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khusunya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG.

b. Memperbanyak fasilitator di daerah agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan sampai pada tingkat kabupaten/kota, dan kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang responsif gender.

c. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan PUG khususnya bagi internal Dinas PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SDM dari Perangkat Daerah strategis lainnya.

d. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG bidang Politik, Sosial dan Hukum di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja;

e. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG;

f. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan PUG

g. Penguatan Kelembagaan PUG melalui Pembentukan POKJA, gender focal point dan bentuk jejaring kerja lainnya

h. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

Sasaran 2	Tingkat Capaian
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	72,43%

Tabel 3.20

Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	Kebijakan di Provinsi	1	1	100	5	3	60
	Kebijakan di Kabupaten / Kota	0	0	0	5	0	0
Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	Organisasi	0	0	0	15	19	127
Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	Lembaga di Provinsi	34	28	82,35	5	6	120
	Kabupaten /Kota	14	13	92,85	14	14	100
	Organisasi	0	0	0	1	0	0
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas	Persen	100	100	100	100	100	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terdiri dari 4 indikator yaitu :

Indikator : Jumlah kebijakan perlindungan perempuan

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahanan utama, yaitu: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Pada tahun 2017 ditargetkan 5 kebijakan terkait perlindunga perempuan, realisasinya 3 kebijakan, tingkat realisasi indikator = (3/5)*100 = 60%. Dokumen kebijakan tersebut antara lain :

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/121/2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kalimantan Tengah, Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2017 di Palangka Raya.
3. Kesepakatan Bersama Antara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Nomor : 052/sekre/DP3A-PPKB/2017, Nomor : 40/KEP/PKK/IX/2017, tanggal 25 September 2017 diPalangka Raya.

Sebelumnya pada tahun 2016 terdapat 1 buah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah, dimana kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemerintah dan para pengambil keputusan dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan perempuan yang sudah menjadi isu secara daerah maupun nasional. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini juga sebagai langkah strategis dalam menjawab perkembangan jaman dan upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Indikator : Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan

Pada tahun 2017 realisasi indikator ini adalah 19 organisasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan,

tingat realisasi berdasarkan target 15 organisasi pada tahun 2017 adalah = (19/15)*100=127%, 19 lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan antara lain :

- Pusat Penelitian Wanita UPR
- Yayasan Tambohak Sinta
- Aisiyah
- Muslimat
- eLSPA
- Lembaga Dayak Panarung
- BKOW
- Dharma Wanita
- GMKI
- BEM UPR
- BEM Poltekkes
- BEM IAIN
- BEM
- Komunitas Huma Betang
- Satgas PKdRT
- Tokoh Masyaraka
- TP-PKK,
- DAD
- LSM Seruni

Indikator : Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan

Pada tahun 2017 berdasarkan target 5 lembaga di Provinsi yang melaksanakan perlindungan perempuan tercapai 6 lembaga yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah , realisasinya =(6/5)*100=120%, lembaga tersebut antara lain :

1. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
2. Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Tengah,
3. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
4. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Tengah,
5. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kalimantan Tengah,
6. Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah

Selanjutnya capaian indikator terkait Kabupaten/Kota yang melaksanakan perlindungan perempuan, realisasinya adalah 14 Kabupaten/kota Di Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan perlindungan perempuan, apabila dihitung tingkat realisasinya adalah= (14/14)*100=100%, hal ini terwujud dengan telah terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 14 Kabupaten/Kota sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Indikator : Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas

Indikator penyelesaian pengaduan kasus terhadap perempuan termasuk TPPPO (tindak pidana perdagangan orang) merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tuntas pada unit layanan P2TP2A dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di kali 100, pada tahun 2017 tercatat 45 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dan seluruhnya dapat ditindaklanjuti, tingkat realisasi =(45/45)*100=100%, adapun rincian dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ditahun 2017 yang tercatat di P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2017 pad P2TP2A

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
	2016	2017
KDRT	9	12
Pelecehan Seksual	0	0
Bunuh Diri	0	0
Eksploitasi Seksual	0	0
Aborsi	0	0
Pencurian	0	0
Perzinahan	3	0
Perdagangan Perempuan	0	1
Perkosaan	4	0
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	5	3
Penganiayaan	0	2
Kekerasan psikis	0	2
Trauma	0	3
JUMLAH	**21**	**23**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Pada tahun 2017 yang masih menjadi indikator sasaran masih dilingkup kebijakan dan lembaga-lembaga pemerintah yang menangani permasalahanan / pengaduan kekerasan terhadap perempuan, Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian dari indikator kinerja sasaran ini antara lain :

a. Budaya yang berkembang di masyarakat yang membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat dan berani, menyebabkan pemikiran pada laki-laki sejak kecil bhwa dirinya haruslah yang menang dalam melakukan segala tindakan, hal ini membentuk *mindset* bahwa laki-laki adalah pihak yang superior dan perempuan adalah pihak inferior

b. Laki-laki dan perempuan yang tidak diposisikan setara dalam masyarakat atau budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi

gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan

c. Kondisi ekonomi yang masih labil mengakibatkan timbulnya berbagai perselisihan dalam rumah tangga sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak tidak terpenuhi

d. Persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
5. Terbentuknya P2TP2A sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan yang relevan. Program tersebut antara lain :

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bagi internal Badan PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota
g. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
h. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
i. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

Sasaran 3	Tingkat Capaian
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	44,44%

Tabel 3.22

Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	Kebijakan di Provinsi	1	3	300	1	0	0
	Kebijakan di Kabupaten / Kota	0	0	0	1	2	200
Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	6	6	100	4	0	0
	Kabupaten /Kota	14	14	100	2	2	100
	Organisasi	0	0	0	15	0	0
Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	Lembaga di Provinsi	6	6	100	4	0	0
	Kabupaten /Kota	14	14	100	2	2	100
	Organisasi	0	0	0	15	0	0
Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	Desa	0	0	0	2	0	0

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menjalankan perannya guna memastikan adanya peningkatan akses anak dan keluarganya terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan peningkatan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Demi terwujudnya kondisi yang idela yang menjadi tujuan bersama, dimana hak anak dapat terpenuhi, pandangan anak mendapatkan penghargaan, serta anak terlindungi. Perlu dikembangkan kebijakan yang dapat mewujudkan bebasnya anak dari berbagai diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan yang salah serta mampu memenuhi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dibidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dan lingkungan bagi tumbuh kembang anak yang optimal, untuk itu dikembangkan kebijakan dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota layak anak. Selain itu kebijakan lain yang terus diupayakan untuk diwujudkan adalah terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak dengan mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta

lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Pastisipasi anak dalam kebijakan tersebut diartikan sebagai upaya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak, secara langsung maupun tidak langsung, dilaksanakan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

Indikator : Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak

Pada tahun 2017 ditetapkan target 1 kebijakan terkait pemenuhan hak anak, terrealisasi 2 kebijakan berupa kesepakatan bersama pengembangan pemenuhan hak anak di kabupaten, tingkat realisasi indikator = (2/1)*100 =200%. 2 buah kesepakatan bersama tersebut antara lain :

1. Kesepakatan bersama dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kabupaten layak anak antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, di Kuala Kurun, tanggal 10 Mei 2017
2. Kesepakatan bersama dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kabupaten layak anak antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Katingan, di Kasongan, tanggal 22 Maret 2017

Indikator : Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak

Pada tahun 2017 ditetapkan target 2 Kabupaten/Kota mendapat sosialisasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, terrealisasi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan, tingkat realisasi indikator = (2/2)*100 =100%.

Indikator : Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak

Pada tahun 2017 ditetapkan target 2 Kabupaten/Kota sudah melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak, realisasinya 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan, tingkat realisasi indikator = (2/2)*100 =100%.

Indikator : Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat

Pada tahun 2017 masih belum terbentuk lembaga layanan anak berbasis masyarakat di tingkat desa lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran 4	Tingkat Capaian
Meningkatnya perlindungan anak	28,57%

Tabel 3.23

Indikator Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Kebijakan di Provinsi	1	1	100	1	0	0
	Kebijakan di Kabupaten / Kota	0	0	0	1	0	0
Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Lembaga di Provinsi	0	0	0	8	0	0
	Organisasi	0	0	0	15	0	0
Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	Lembaga di Provinsi	4	4	100	4	4	100
	Organisasi	0	0	0	15	0	0
Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan terdiri dari 4(empat) indikator yaitu :

Indikator : Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus

Pada tahun 2017 tidak ada kebijakan yang baru terkait perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus, namun pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016

tanggal 30 Desember 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah

Indikator : Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus

Pada tahun 2017 tidak dilaksanakan sosialisasi tentang perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus.

Indikator : Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus

Selain melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan bentuk pendampingan lainnya, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dalam rangka terwujudnya percepatan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan komitmen dari seluruh pelaksana layanan sebagai tindak lanjut dari kebijakan perlindungan anak di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi indikator ini adalah 4 (empat) lembaga sudah melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus Lembaga di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara konsisten melaksanakan pelayanan dalam upaya perlindungan terhadap anak yaitu :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Tengah, Jln.M.H. Thamrin No.11, Palangka Raya.
2. UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) POLDA Kalimantan Tengah, Jln.Tjilik Riwut Km.1, Palangka Raya
3. Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Barigas dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Jln.Rajawali VII, Palangka Raya
4. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalimantan Tengah, Jln. Suprapto No.08, Palangka Raya.

Indikator : Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti

Indikator penyelesaian pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani tuntas di kali 100 pada tahun 2017 tercatat 45 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dan seluruhnya dapat ditindaklanjuti, tingkat realisasi =(45/45)*100=100%, adapun rincian dari kasus anak yang terjadi ditahun 2017 yang tercatat di P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.24

Data Kekerasan Terhadap Anak 2016- 2017 pada P2TP2A

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
	2016	2017
Persetubuhan Terhadap Anak	3	5
Perbuatan Cabul Terhadap Anak	8	8
Perkosaan Terhadap Anak	1	8
Penganiayaan Terhadap Anak	7	1
Perbuatan Asusila Anak	0	4
Perdagangan Anak (Trafficking) /pencurian	1	0
Pornografi dan Pornoaksi	1	1
Bawa Lari Anak	0	0
Adopsi Anak	0	1
Perebutan Hak Asuh Anak	4	1
Penelantaran Anak	0	11
Kekerasan Psikis	0	1
Trauma	0	3
ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	*1*	*2*
Kehamilan di Luar Nikah	0	1
JUMLAH	**26**	**45**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada sasaran Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus dan Meningkatnya perlindungan anak, yaitu :

a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam beragam bentuk, seperti advokasi kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggugah komitmen terhadap perlindungan hak anak
b. Kurangnya data yang mutahir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan .
c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak
e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan anak.
f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahanan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan anak,

yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahanan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
   1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
   2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
   3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
   4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
b. Sudah terbentuknnya gugus tugas Kabupaten/Kota layak anak di 7 Kabupaten/Kota
   1. Kabupaten Barito Selatan
      Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 241 Tahun 2015
   2. Kota Palangka Raya
      Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/721/2013
   3. Kabupaten Katingan
      Keputusan Bupati Katingan Nomor : 476/588/KPTS/XII/2014
   4. Kabupaten Barito Utara
      Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/247/2015
   5. Kabupaten Kapuas
      Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 525/BPPKB Tahun 2014
   6. Kabupaten Kotawaringin Barat
      Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 401/30b/BPPKB/IV/2014
   7. Kabupaten Lamandau

Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/287/HUK/VII/2015

c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendaian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

a. Pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan haknya, masih belum menjadi *mainstream* pemahaman para pemangku kepentingan
b. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang perlindungan hak anak
c. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan
d. Masih kurangnya koordinasi kebijakan anak antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota
e. Belum optimalnya evaluasi kebijakan anak sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada
f. Belum terbentuknya gugus tugas Kabupaten/Kota layak anak di 7 (tujuh) Kabupaten antara lain :
    1. Kabupaten Kotawaringin Timur
    2. Kabupaten Pulang Pisau
    3. Barito Timur
    4. Kabupaten Seruyan
    5. Kabupaten Gunung Mas
    6. Kabupaten Murung Raya
    7. Kabupaten Sukamara

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan perlindungan anak
b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahanan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait anak.
c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan anak melalui pelatihan-pelatihan dan diklat teknis penyusunan data anak
d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak
e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani perlindungan anak.
g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi organisasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Sehingga disusunlah Sasaran Strategis "Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran", dan "Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas". Realisasi sasarannya sebagai berikut :

Sasaran 5	Tingkat Capaian
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100%

Tabel 3.25

Indikator Kinerja Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran

Pada tahun 2017 target dari indikator ini realisasinya 100%, indikator ini diukur berdasarkan tersedianya dokumen koordinasi perencanaan dan anggaran organisasi dengan mempertimbangkan bahwa penyusunan dan penyampaian dokumen dilakukan tepat waktu, serta koordinasi internal Organisasi sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
2. Dokumen RKA
3. Dokumen DPA

4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5. Rapat koordinasi Perencanaan

Indikator : Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

Pada tahun 2017 target dari indikator ini realisasinya 100%, indikator ini diukur berdasarkan tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta pelaksanaan koordinasi pelaporan manual maupun online yang dilakukan secara berkala terhadap proses pelaksanaan kinerja dan anggaran yang sudah terlaksanan dengan baik sebagai berikut :

1. Dokumen LKIP
2. Dokumen Laporan Keuangan
3. Laporan Kinerja Triwulan
4. Laporan Realisasi Anggaran melalui *simp3d.kalteng.go.id*
5. Laporan TEPRA (APBD dan APBN)
6. Evaluasi RENJA
7. Evaluasi RKPD
8. Evaluasi pelaksanaan indikator RPJMD

Sasaran 6	Tingkat Capaian
Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	100%

Tabel 3.26

Indikator Kinerja Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	Persen	100	100	100	100	100	100
Tersedianya bahan penataan organisasi,	Persen	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
sistem, prosedur dan tata hubungan kerja							

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif

Pada tahun 2017 target dari indikator ini realisasinya 100%, indikator ini diukur dengan mempertimbangkan beberapa proses pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berjalan dengan baik , sebagai berikut :

1. Analisis kepegawaian
2. Evaluasi kinerja pegawai
3. Daftar urut kepangkatan
4. Daftar nominatif pegawai
5. Diklat dan pelatihan pegawai
6. Terlaksananya Penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan

Indikator : Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja

Pada tahun 2017 target dari indikator ini realisasinya 100%, indikator ini diukur dengan mempertimbangkan ketersediaan dokumen dan beberapa proses dalam penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja yang berjalan dengan baik , sebagai berikut :

1. Dokumen SOP Administrasi Pemerintahaan dan penerapannya di organisasi
2. Dokumen ROADMAP Reformasi Birokrasi
3. Dokumen Inventarisasi Barang dan Aset Milik Daerah (KIB,KIR, Dok Rekonsiliasi Aset)

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya jumlah personil
b. Kurangnya data yang mutahir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan kerja.
c. Masih lemahnya sistem koordinasi internal organisasi
d. Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di

organisasi.

e. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahanan yang terjadi dalam lingkungan organisasi

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan organisasi, antara lain adalah :
   1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
   2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
   3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
   4. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Komitmen dalam pelaksanaan kinerja sudah terbentuk
c. Motivasi yang tinggi dalam membangun organisasi

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah

Tantangan / Hambatan

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara umum , antara lain :

a. Berkembangnya sistem kebijakan pemerintahan menuntut profesionalisme para aparatur dalam berkinerja
b. Pengelolaan kinerja organisasi yang menunut perlunya pengawasan,

kontrol, serta tindak lanjut yang berkesinambungan

c. Antusias aparatur terhadap perubahan serta dinamika yang terjadi dalam organisasi, terkadang mempengaruhi kinerja

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Diperlukan konsistensi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas serta pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi yang dimulai dari unit terkecil dalam organisasi, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kapasitas dan kinerja aparatur

b. Dilakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja aparatur, serta pemberlakukan *punishment* dan *reward* terhadap aparatur.

c. Meningkatkan tatakelola organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam mendukung kebijakan pemerintah dibidang keluarga berencana maka ditetapkan sasaran "Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk"," Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana"," Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera", pada tahun 2017 Realisasi dari sasaran – sasaran tersebut sebagai berikut :

Sasaran 7	Tingkat Capaian
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	66,67%

Tabel 3.27

Indikator Kinerja Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	Orang	0	0	0	3	0	0
Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk	Kesepakatan`	0	0	0	1	1	100
Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 3(tiga) indikator yaitu :

Indikator : Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk

Pada tahun 2017 belum terdapat aparatur lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang terlatih dalam konsep dan penerapan pengendalian penduduk, namun pada bidang pelaksana kebijakan pengendalian penduduk kapasitas SDM sudah memedai, namun belum dipertajam melalui proses pelatihan, bimbingan teknis. Yang nantinya indikator ini akan terjawab setelah terdapat aparatur yang memiliki surat keterangan terkait kompetensi tersebut .

Indikator : Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk

Pada tahun 2017 ditetapkan target 1 kesepakatan terkait upaya peningkatan pengendalian penduduk, realisasinya terdapat 1 kesepakatan bersama, tingkat realisasi indikator = (1/1)*100 =100%. kesepakatan bersama tersebut yaitu :

1. Kesepakatan bersama antara Ketua ikatan Dokter Indonesia pengurus

wilayah Kalimantan tengah dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Kalimantan Tengah tentang keterlibatan dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya , tanggal 12 Januari 2015.

Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program dan kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan be-KB di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan agar IDI pengurus wilayah Kalimantan tengah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dn Perlindngan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memfasilitasi dan terlibat daam pengelolaan, peayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator : Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan

Realisasi indikator ini adalah 100%. Sebagai alat analisis pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan terkait pengendalian penduduk dan KB, maka kebutuhan data yang akurat sangat dibutuhkan. Kebutuhan data selama ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengolahan data statistik dasar yang disediakan guna kebutuhan data bagi masyarakat dan pemerintah. Pada tahun 2017 tersedia data sekunder yang bersumber dari BPS dalam publikasinya Kalimatan Tengah dalam Angka, dari sisi interal organisasi juga telah di publikasikan dokumen data terpilah gender dan anak tahun 2017 yang didalamnya memuat data kependudukan sektoral yang disajikan terpilah.

Sasaran 8	Tingkat Capaian
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	97,84%

Tabel 3.28

Indikator Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan	Dokumen	0	0	0	1	1	100
Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	persen	78	88,78	113,8	80	79,21	99,01
Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	orang	385.000	368.652	111,5	394.872	373.140	94,50

Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :

Indikator : Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana bertujuan Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik KB sehingga tercapai penambahan peserta baru, Membina kelestarian peserta KB, Meletakkan dasar bagi mekanisme sosio cultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan, serta untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku kearah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Pada tahun 2017 ditetapkan target tersedianya 1 dokumen pelaksanaan KIE, dan realisasinya adalah 1 dokumen, dengan tingkat realisasi : (1/1)*100=100%, dokumen KIE yaitu :

1. Dokumen laporan pelayanan KIE dan manfaat KB bagi pasangan usia subur (PUS) di Papalngka Raya

Indikator : Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Sehingga melalui angka Rasio akseptor KB dapat dilihat sejauhmana tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengendalian Penduduk. Rasio Akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) pada umumnya disajikan dalam bentuk Rasio yang membandingkan Jumlah Akseptor/Peserta KB Aktif pada suatu wilayah dalam periode tertentu dengan Jumlah Pasangan Usia Subur pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Dalam hal ini untuk menghitung partisipasi PUS sebagai peserta KB Angka Rasio yang didapatkan dikalikan 100.

. Sampai akhir 2017, Jumlah peserta KB aktif 373.140 dan Jumlah Pasangan Usia Subur 471.099 jadi rasio akseptor KB = 373.140/471.099= 0,792, dan tingkat partisipasi PUS =(373.140/471.099)*100=79,21%, tingkat realisasi indikator ini dibandingkan dengan target adalah = (79,21/80)*100=99,01, hal ini menunjukan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB masih kurang, namun sudah menunjukan hasil yang positif karena terjadi peningkatan jumlah akseptor maupun jumlah rasio jika melihat kondisi pada Pada tahun 2016 partisipasi PUS ber-KB = 78,14%, walaupun pada tahun pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah pasangan usia subur

Indikator : Meningkatnya jumlah peserta KB aktif

Pada tahun 2017 jumlah peserta KB aktif sebesar 373.140, realisasinya mencapai 94,49% dari target yang telah ditetapkan berjumlah 394.872 orang sebagai peserta KB aktif. Jumlah peserta KB yang aktif meningkat 1,01% apabila dibandingkan dengan jumlah peserta KB aktif pada tahun 2016 sebesar 368.652.

Berikut ini data peserta KB akti berdasarkan metode kontrasepsi diProvinsi Kalimantan Tengah :

Tabel 3.29

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1033	727	126	921	2362	17721	9086	31976
2	Kotawaringin Timur	1230	1224	194	1818	9574	30677	21683	66400
3	Kapuas	1087	808	154	1534	10949	28768	23753	67053
4	Barito Selatan	180	127	7	135	2040	3831	6648	12968
5	Barito Utara	266	115	26	298	1745	8380	8141	18971
6	Katingan	284	140	19	648	4014	13504	10175	28784
7	Seruyan	202	102	27	544	1415	8331	3817	14438
8	Sukamara	132	25	1	229	635	6711	1882	9615
9	Lamandau	252	95	87	109	1305	7358	2743	11949
10	Gunung Mas	64	129	6	166	1979	12160	3091	17595
11	Pulang Pisau	1127	325	25	811	2313	7911	4092	16604
12	Murung Raya	212	186	10	361	1666	8589	6728	17752
13	Barito Timur	347	261	8	184	1725	8017	8439	18981
14	Kota Palangkaraya	1855	597	122	1188	3233	18384	14675	40054
JUMLAH		**8271**	**4861**	**812**	**8946**	**44955**	**180342**	**124953**	**373140**

Sumber : BKKBN

Tabel 3.30

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1050	762	134	884	2463	18261	9085	32639
2	Kotawaringin Timur	1107	1149	157	1680	9005	28332	20290	61720
3	Kapuas	1807	1512	137	4827	10912	24870	20391	64456
4	Barito Selatan	193	130	9	200	2735	8260	9327	20854
5	Barito Utara	245	102	26	289	1437	8508	8780	19387
6	Katingan	271	104	16	770	3711	13791	9675	28338
7	Seruyan	1079	85	16	693	2994	8780	4481	18128
8	Sukamara	86	9	0	186	305	4546	1295	6427
9	Lamandau	200	93	71	150	1162	6913	2550	11139
10	Gunung Mas	52	75	6	887	2987	12396	6809	23212
11	Pulang Pisau	445	284	27	1010	2032	10107	4468	18373
12	Murung Raya	184	98	10	327	1349	7613	5859	15440
13	Barito Timur	206	144	7	108	1033	4526	5437	11461
14	Kota Palangkaraya	1480	462	94	1313	2863	16931	13935	37078
JUMLAH		**8405**	**5009**	**710**	**13324**	**44988**	**173834**	**122382**	**368652**

Sumber : BKKBN

Sasaran 9	Tingkat Capaian
Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	100%

Tabel 3.31

Indikator Kinerja Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	Dokumen	0	0	0	1	1	100
Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	Kesepakatan`	0	0	0	1	1	100

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2017 tersedia 1 dokumen konsep Program Ketahanan Keluarga, realisainya berdasarkan target 1 dokumen adalah =(1/1)*100=100%, dokuen dimaksud yaitu :

1. Dokumen konsep pembangunan ketahanan dan keluarga sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator : Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga

Pada tahun 2017 ditetapkan target 1 kesepakatan terkait upaya ketahan keluarga, realisasinya 1 kesepakatan, dengan tingkat realisasi indikator = (1/1)*100

=100%. kesepakatan bersama tersebut yaitu :

1. Kesepakatan bersama antara Ketua pimpinan aisyiyah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Dearah di Kabupaten/Kota terkait bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
b. Kurangnya data yang mutahir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar pengajuan perumusan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi.
d. Masih kurangnya komitmen para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga muncul anggapan bahwa Sektor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera hanya merupakan sektor pendukung dalam Pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
f. Munculnya suatu pola pemahaman dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator, yaitu :

- Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai

PP Nomor 38 tahun 2007

- Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan informasi tentang KB serta Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanaan keluarga

Tantangan / Hambatan

Namun demikian sama dengan sasaran sebelumnya dari keberhasilan capaian tersebut di atas, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
b. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
c. Masih kurangnya koordinasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota
d. Belum optimalnya evaluasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Permepuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalamhal penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahanan atau isu yang berkembang di

masyarakat terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pelatihan-pelatihan dan diklat / bimbingan teknis

d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang efektif dan efisien

e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan/forum daerah yang menangani bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2017 adalah sebesar 11.990.771.216 (*Sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah*) ,dengan rincian :

Tabel 3.32

Kondisi BTl dan BL 2016 - 2017

JENIS BELANJA	2016			2017		
	JUMLAH	REALISASI	%	JUMLAH	REALISASI	%
BTL	5.977.097.105,10	5.853.917.664	97,94	6.931.201.216	6.129.066.675	88,43
BL	6.387.500.000	6.226.672.355	97,48	5.059.510.000	4.927.634.188	97,39
	12.364.597.105,10	12.080.590.019	97,70	11.990.771.216	11.056.700.863	92,21

2. Realisasi anggaran Belanja Langsung perprogram kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Provinsi Kalimanan Tengah tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33

Realisasi Belanja Langsung 2016 - 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI 2016			REALISASI 2017		
		PAGU	KEUANGAN	%	PAGU	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.505.350.000**	**1.422.421.071**	**94,49**	**1.556.860.000**	**1.486.361.902**	**95,47**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	5.992.000	99,87	6.000.000	5.995.000	99,92
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000	33.101.796	55,17	68.400.000	42.979.497	62,84
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000	57.704.765	96,17	60.000.000	55.120.156	91,87
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	381.300.408	376.800.268	98,82	591.328.000	581.896.000	98,40
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	140.000.000	139.995.900	100,00	150.000.000	137.239.000	91,49
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	14.955.000	59,82	15.000.000	14.925.000	99,50
7	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	59.999.850	100,00	60.000.000	59.999.400	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000	40.989.400	51,24	40.000.000	39.999.950	100,00
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	75.000.000	74.900.000	99,87	20.000.000	16.380.000	81,90
12	Penyediaan makanan dan	20.000.000	19.945.000	99,73	35.000.000	34.990.000	99,97

	minuman						
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.000.000	34.987.500	99,96	310.000.000	305.834.499	98,66
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	215.000.000	215.000.000	100,00	181.132.000	181.003.400	99,93
15	Rujukan Berobat PNS	333.049.592	333.049.592	100,00	10.000.000	0	0,00
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**21.297.185**	**21.180.000**	**99,45**	**25.000.000**	**24.952.500**	**99,81**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.297.185	21.180.000	99,45	25.000.000	24.952.500	99,81
III	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**12.000.000**	**12.000.000**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	Rapat koordinasi perencanaan	12.000.000	12.000.000	100,00	0	0	0,00
IV	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**80.000.000**	**79.985.000**	**99,98**	**80.000.000**	**79.987.500**	**99,98**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja S KPD	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00
3	Penyusunan rka-SKPD	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	24.995.000	99,98
4	Penyusunan renja SKPD	25.000.000	24.985.000	99,94	25.000.000	24.992.500	99,97
V	**Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**1.861.146.100**	**1.822.016.805**	**97,90**	**1.505.000.000**	**1.481.037.838**	**98,41**

1	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	221.146.100	221.146.100	100,00	200.000.000	192.248.500	96,12
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab/Kota	100.000.000	99.898.650	99,90	140.000.000	139.401.760	99,57
3	Rakor Pokja PUG Kab/Kota se-Kalteng	150.000.000	149.592.600	99,73	0	0	0,00
4	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatap PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	0,00	0	0	50.000.000	48.514.405	97,03
5	Sosialisasi Pembentukan Pokjatap dan Satgas PkdRT se-Kalteng	100.000.000	99.999.200	100,00	0	0	0,00
6	Sosialisasi/Advokasi Pengembangan PHA di Kab/Kota seKalimantan Tengah	210.000.000	200.077.000	95,27	140.000.000	138.839.700	99,17
7	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	200.000.000	199.485.850	99,74	275.000.000	274.014.850	99,64
8	Rakornas Forum Anak Nasional	150.000.000	150.000.000	100,00	150.000.000	139.088.258	92,73
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan S ayang Ibu	285.000.000	259.538.600	91,07	200.000.000	199.899.000	99,95
10	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	170.000.000	168.114.700	98,89	0	0	0,00
11	Rapat Koordinasi Forum Data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab/Kota	275.000.000	274.164.105	99,70	0	0	0,00

12	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	0,00	0	0,00	350.000.000	349.031.365	99,72
VI	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**0,00**	**0**	**0,00**	**75.000.000**	**74.900.000**	**99,87**
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	0,00	0	0,00	50.000.000	50.000.000	100,00
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	0,00	0	0,00	25.000.000	24.900.000	99,60
3	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	80.000.000,00	79.982.000	99,98	0	0	0,00
4	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	350.000.000,00	348.061.670	99,45	0	0	0,00
5	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	100.000.000,00	99.768.000	99,77	0	0	0,00
VII	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**1.355.096.650**	**1.320.222.140**	**97,43**	**1.000.000.000**	**977.822.334**	**97,78**
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	400.000.000,00	395.355.842	98,84	400.000.000	391.605.697	97,90
2	Sosialisasi Anti Kekerasan	61.082.350,00	61.082.350	100,00	50.000.000	49.997.500	100,00
3	Penyusunan Buku Penduan Pencegahan KdRT	35.000.000,00	35.000.000	100,00	0	0	0,00

4	Pengembangan S istem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	482.600.000,00	459.590.398	95,23	500.000.000	486.455.737	97,29
5	Penyediaan Jasa Operasional S atgas PkdRT (Penyuluhan, dll)	0,00	0	0	50.000.000	49.763.400	99,53
6	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se Kab/Kota	100.000.000,00	97.259.800	97,26	0	0	0,00
7	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan, dll)	26.414.300,00	26.414.300	100,00	0	0	0,00
8	Deteksi dini ca cervix bagi perempuan	250.000.000,00	245.519.450	98,21	0	0	0,00
VIII	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**567.660.065**	**567.625.165**	**99,99**	**300.000.000**	**292.404.414**	**97,47**
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	137.285.715,00	137.285.715	100,00	0	0	0,00
2	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	31.916.500,00	31.916.500	100,00	0	0	0,00
3	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	100000000	99.996.000	100,00	0	0	0,00

4	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional)	0,00	0	0,00	50.000.000	47.402.614	94,81
5	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	298.457.850,00	298.426.950	99,99	150.000.000	149.081.200	99,39
6	Promosi Peningkatan Peran S erta Perempuan Dalam Pembangunan	0,00	0	0!	100.000.000	95.920.600	95,92
IX	**Program Penyusunan Profil Lembaga**	**175.000.000**	**174.622.300**	**99,78**	**295.000.000**	**288.751.550**	**97,88**
1	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	0,00	0	0,00	220.000.000	214.637.050	97,56
2	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	175000000	174.622.300	99,78	75.000.000	74.114.500	98,82
X	**Program Keluarga Berencana**	**72.300.000**	**72.256.400**	**99,94**	**200.000.000**	**198.766.150**	**99,38**
1	Pelayanan KIE	37.300.000	37.260.000	99,89	125.000.000	124.631.150	99,70
2	Promosi Keikutsertaan Ber KB Pada Pasangan Usia S ubur (PUS)	0,00	0	0,00	75.000.000	74.135.000	98,85
3	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	35.000.000	34.996.400	99,99	0	0	0,00
XI	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah**	**22.650.000**	**22.650.000**	**100,00**	**22.650.000**	**22.650.000**	**100,00**

1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	22.650.000	22.650.000	100,00	22.650.000	22.650.000	100,00
JUMLAH		**5.672.500.000**	**5.514.978.881**	**97,22**	**5.059.510.000**	**4.927.634.188**	**97,39**

Dari tabel diatas rdapat dilihat realisasi tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016. Selanjutnya perkembangan dukungan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 4 tahun terahir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34

BTL 2014 - 2017

Belanja Tidak Langsung (BTL)				
Uraian	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Pagu Anggaran	3.944.767.552	5.028.078.438	5.977.097.105,10	6.931.201.216
Realisasi	3.897.054.866	4.875.019.783	5.853.917.664	6.129.066.675
%	**98,79**	**96,96**	**97,94**	**88,43**

Tabel 3.35

BL 2014 - 2017

Belanja Langsung (BL)				
Uraian	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Pagu Anggaran	8.257.303.580	7.886.000.000	6.387.500.000	**5.059.510.000**
Realisasi	7.925.761.152	7.657.996.023	6.226.672.355	**4.927.634.188**
%	**95,98**	**97,11**	**97,48**	**97,39**

Pada tahun anggaran 2017 Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan tingkat realisasi dibawah 80 persen sebagai berikut :

Tabel 3.36

Relisasi Kegiatan dibawah 80%

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Relisasi	Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			
1	Rujukan Berobat PNS	10.000.000	0	0

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
   Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021, maupun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Tengah.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskupin demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan

perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha.

B. Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup berhasil dalam pelaksanaan tugasnya. namun demikian masih banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih perlu ditingkatkan.
2. Belum tersedianya data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program dan Kegiatan.
3. Belum terbentuknya kerjasama yang kuat secara sektoral maupun lintas sektoral dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta pencapaian visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Lembaga-lembaga terkait.
4. Dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan dan dasar pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat kekurangan sehingga masih sulit untuk tahap pelaksanaan program kegiatan dan evaluasinya.
5. Belum cukup baiknya strategi kebijakan Perencanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih belum efektif dan efisien guna pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kewenangan yang belum kuat antara fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyangkut Program KB.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja SKPD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak, Kependudukan dan Keuarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja SKPD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di semua SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap SKPD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi kalimantan tengah adalah mengubah *mindset* individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (rensponsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator *outcome*, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak bersifat kualitatif dan tidak mudah diukur terutama dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan berbagai SKPD dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif, dan acapkali merupakan *outputs* dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja SKPD ini tidak dapat diukur.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M.H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. LIES FAHIMAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 19 Juni 2017

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS

Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631207 199102 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SOPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	1 Kebijakan di Provinsi
			1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2 Kabupaten /Kota
			15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	41 Lembaga di Provinsi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	41 Lembaga di Provinsi
			11 Kabupaten /Kota
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	4 Kelompok Usaha
		Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup	3 Kab/Kota
		Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak	1 Kebijakan di Provinsi
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender	5 Lembaga di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		dan data terpilah anak	Provinsi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	5 Lembaga di Provinsi
			5 Kabupaten /Kota
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	5 Kebijakan di Provinsi
			5 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	5 Lembaga di Provinsi
			14 Kabupaten /Kota
			1 Organisasi
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan secara tuntas	100 Persen
3.	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	1 Kebijakan di Provinsi
			1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak	4 Lembaga di Provinsi
			2 Kabupaten /Kota
			15 Organ isasi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	4 Lembaga di Provinsi
			2 Kabupaten /Kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
			15 Organisasi
		Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	2 Desa
4.	Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	1 Kebijakan di Provinsi
			1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	8 Lembaga di Provinsi
			15 Organisasi
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	4 Lembaga di Provinsi
			15 Organisasi
		Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	100 Persen
5.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	100 Persen
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	100 Persen
6.	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	100 Persen
		Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja	100 Persen
7.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	3 Orang
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan	1 Kesepakatan'

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk	
		Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	1 Dokumen
8.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan	1 Dokumen
		Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	80 Persen
		Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	394.872 Orang
9.	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	1 Dokumen
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	1 Kesepakatan`

	Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.456.860.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	25.000.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	80.000.000
4.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	1.505.000.000
5.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	75.000.000
6.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	1.100.000.000
7.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Rp.	300.000.000

	Program		Anggaran
8.	Program Penyusunan Profil Lembaga	Rp.	245.000.000
9.	Program Keluarga Berencana	Rp.	200.000.000
10.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Rp.	22.650.000

Palangka Raya, 19 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

KEPALA DINAS,

Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631207 199102 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M.H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**Dr. LIES FAHIMAH, M.Si**
NIP	:	**19631207 199102 2 001**
Jabatan	:	**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan	:	**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2017- 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 19 Juni 2017

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS

Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631207 199102 2 001

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

UNIT : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TUGAS DAN FUNGSI : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan		DP3APPB, Biro Hukum
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan		DP3APPB
		Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG		DP3APPB
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan		DP3APPB
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga		DP3APPB
		Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup		DP3APPB
		Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak		DP3APPB, Biro Hukum
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data		DP3APPB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		terpilah anak		
		Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak		DP3APPB
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak		DP3APPB
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan		DP3APPB, Biro Hukum
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan		DP3APPB
		Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan		DP3APPB
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas	Jumlah kasus yang tuntas dibagi jumlah kasus dikali 100	DP3APPKB, P2TP2A
3.	Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak		DP3APPKB, Biro Hukum
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak		DP3APPKB
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak		DP3APPKB
		Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat		DP3APPKB
4.	Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus		DP3APPKB, Biro Hukum
		Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus		DP3APPKB
		Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus		DP3APPKB
		Persentase pengaduan kasus anak yang di	Jumlah pengaduan kasus	DP3APPKB, P2TP2A

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		tindaklanjuti	anak yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus dikali 100	
5.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun dengan baik di bagi jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran di kali 100	DP3APPKB
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun dengan baik di bagi jumlah dokumen evaluasi di kali 100	DP3APPKB
6.	Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif		DP3APPKB
		Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja		DP3APPKB
7.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk		BKKBN, DP3APPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk		DP3APPKB
		Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi		BPS, DP3APPKB, Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		kewilayahan		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan berkesinambungan		DP3APPKB
		Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	Jumlah akseptor KB di bagi jumlah PUS di kali 100	BKKBN
		Meningkatnya jumlah peserta KB aktif		BKKBN
9.	Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera		BPS, DP3APPKB
		Jumlah SDM yang diberikan Bimbingan Teknis tentang Ketahanan Keluarga		DP3APPKB
		Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga		DP3APPKB

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

KEPALA DINAS,

Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631207 199102 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SOPD : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	**1** Kebijakan di Provinsi
		1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	**2** Kabupaten /Kota
		15 Organisasi
	Jumlah lembaga yang menyusun dokumen ARG	**41** Lembaga di Provinsi
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	**41** Lembaga di Provinsi
		11 Kabupaten /Kota
	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	4 Kelompok Usaha
	Tersedianya lembaga layanan peduli perempuan berbasis masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup	**3** Kab/Kota
	Jumlah kebijakan penyusunan data terpilah gender dan data terpilah anak	**1** Kebijakan di Provinsi
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	**15** Organisasi

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Jumlah lembaga yang mampu menyusun data terpilah gender dan data terpilah anak	**5** Lembaga di Provinsi
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah gender dan data terpilah anak	**5** Lembaga di Provinsi
		5 Kabupaten /Kota
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	**5** Kebijakan di Provinsi
		5 Kebijakan di Kabupaten / Kota
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi perlindungan perempuan	**15** Organisasi
	Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	**5** Lembaga di Provinsi
		14 Kabupaten /Kota
		1 Organisasi
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang mendapat layanan secara tuntas	**100** Persen
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	**1** Kebijakan di Provinsi
		1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosilaisasi kebijakan pemenuhan hak anak	**4** Lembaga di Provinsi
		2 Kabupaten /Kota
		15 Organisasi
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	**4** Lembaga di Provinsi
		2 Kabupaten /Kota

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		15 Organisasi
	Tersedianya lembaga layanan anak berbasis masyarakat	**2** Desa
Meningkatnya perlindungan anak	Jumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	**1** Kebijakan di Provinsi
		1 Kebijakan di Kabupaten / Kota
	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	**8** Lembaga di Provinsi
		15 Organisasi
	Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak, termasuk anak dalam kondisi khusus	**4** Lembaga di Provinsi
		15 Organisasi
	Persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti	**100** Persen
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	**100** Persen
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	**100** Persen
Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas	Terlaksananya perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional dan kompetitif	**100** Persen
	Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja	**100** Persen
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaaan Program Pengendalian Penduduk	Jumlah SDM yang terlatih dalam Konsep dan Penerapan Pengendalian Penduduk	**3** Orang
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Peningkatan Pengendalian Penduduk	**1** Kesepakatan`
	Tersedianya data Penduduk secara berkala yang memperhatikan dimensi kewilayahan	**1** Dokumen
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana	Tersusunnya Rencana Pelaksanaan KIE dalam mewujudkan Keluarga Berencana secara berkala dan	**1** Dokumen

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	berkesinambungan	
	Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor KB (Rasio Akseptor KB)	**80 persen**
	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	**394.872 orang**
Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelaksanaaan Program Keluarga Sejahtera dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Konsep Program Ketahanan Keluarga dalam upaya mewujudkan Keluarga Sejahtera	**1** Dokumen
	Jumlah Kesepakatan bersama yang dihasilkan dan direkomendasikan dalam upaya Ketahanan Keluarga	**1** Kesepakatan`

Palangka Raya, 31 Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. ENDANG KUSRIATUN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610705 198801 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SOPD : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,14 persen
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	28,89 persen
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,31 persen
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0244
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100 persen
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	28,57 persen
	Rasio anak korban kekerasan	0,0244
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100 persen
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	8,89 persen
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B

SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,31
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,2
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,806
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	19,4 persen

Palangka Raya, Juni 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P3A-PPKB

LIES FAHIMAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631207 199102 2 001